

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, BPN RI, Jakarta, 2014.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ketiga, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Chandra S. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah : Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Erna Sri wibawanti dan R. Mujiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Maju Mundur, Bandung, 2009.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2015.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Saptosih Ismiati, *KDRT dan HAM*, Deepublish, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang *Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang *Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang *Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman*.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*.

B. SUMBER LAIN

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51226b6d8ef8d/prosedur-dan-persyaratan-pemecahan-sertifikat-tanah/> diunduh pada tanggal 20 Desember 2019, Pukul 07:08 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 11:30 WIB.

Teddy Chandra, *Kepastian Hukum Sertifikat Kepemilikan Tanah Dihubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Disertasi Program Pascasarjana Unisba, Bandung, 2009.